



## Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengukur Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar

Wilda Afriany<sup>1\*</sup>, Rice Haryati<sup>2</sup>, Dica Lady Silvera<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [wildaafriany@gmail.com](mailto:wildaafriany@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja keuangan selama kurun waktu 2014-2017 ditinjau dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan riset lapangan dan riset pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat peningkatan kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2014-2017 dengan realisasi tahun 2014 sebesar 87,10% (cukup efektif), pada tahun 2015 menurun menjadi 85,82% (cukup efektif), pada tahun 2016 meningkat menjadi 92,96% (efektif) meningkat kembali setelah melakukan penggabungan SKPD Satpol PP dan SKPD Damkar menjadi OPD Satpol PP dan Damkar menjadi 94,42% (efektif). Namun terjadi penurunan kinerja keuangan pada Pemadam Kebakaran dengan realisasi tahun 2014 sebesar 93,82% (cukup efektif), pada tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan karena anggaran penanggulangan pasca bencana alam yang hanya terealisasi 0,8% dari anggaran sebesar 14.744.339.000 sehingga secara keseluruhan realisasi anggarannya menjadi 16,09% (tidak efektif) dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 80,61%. (cukup efektif). 2) Berdasarkan hasil uji komparasi 2 sampel berpasangan diketahui bahwa anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 mengalami peningkatan dan kinerja anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 mengalami peningkatan pula.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, OPD Satpol PP Damkar

**Abstract:** This study aims to determine the improvement in financial performance during the period 2014-2017 reviewed from the financial statements of the Regional Apparatus Organization (OPD) of the Pamong Praja Police Unit and the Tanah Datar Regency Fire Department. The data collection method used in this research is by using field research and literature research. The data analysis method in this study uses a comparative test. The results of this study show that: 1) There was an increase in the financial performance of the Pamong Praja Police Unit from 2014-2017 with the realization in 2014 of 87.10% (quite effective), in 2015 it decreased to 85.82% (quite effective), in 2016 it increased to 92.96% (effective) it increased again after merging SKPD Satpol PP and SKPD Damkar to become OPD Satpol PP and Damkar to 94.42% (effective). However, there was a decrease in financial performance in the Fire Department with a realization in 2014 of 93.82% (quite

*effective), in 2015 there was a significant decrease due to the post-natural disaster management budget which was only realized 0.8% of the budget of 14,744,339,000 so that the overall budget realization was 16.09% (ineffective) and in 2016 there was an increase to 80.61%. (quite effective). 2) Based on the results of the comparison test of 2 paired samples, it is known that the OPD budget of the Pamong Praja Police Unit and Fire Department from 2014-2017 has increased and the performance of the OPD budget of the Pamong Praja Police Unit and Fire Department from 2014 – 2017 has also increased.*

***Keywords:*** *Financial Performance, Budget Realization Report, OPD Satpol PP Damkar*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan adanya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yaitu “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Jannaini, 2012:4). Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah.

Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol

dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Menjawab tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, ada perubahan mendasar dalam penamaan dinas atau badan di provinsi, kabupaten atau kota. Jika sebelumnya dinas atau badan disebut juga sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini namanya berubah organisasi perangkat daerah (OPD). organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, OPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala OPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala OPD, pada akhirnya akan meminta kepala OPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan OPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa OPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kertas kerja atau Laporan keuangan oleh OPD ini dilator belakang oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai salah satu OPD yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sekaligus sebagai penguasaan anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum tahun 2016 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan satuan yang terpisah, dan menyatu akibat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan SKPD menjadi OPD. Sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran memiliki targer pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai perpanjangan tangan Pemkab ataupun tugas tugas lainnya yang telah diatur dalam undang undang. Penyusunan laporan keuangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pemkab Tanah Datar berdasarkan PSAP yang berlaku. Penyusunan tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berisikan kinerja keuangan dan kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tanah Datar secara keseluruhan. Pengukuran kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tanah Datar baik secara keuangan maupun keseluruhan dapat dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan, sehingga kualitas pegawai bagian keuangan sangat berperan dalam penilaian kinerja tersebut. Setelah penyatuan Satpol PP dengan Pemadam Kebakaran dalam satu OPD, pegawai keuangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran harus mampu menyesuaikan penyusunan laporannya menjadi satu bagian. Hal ini menjadi sulit dikarenakan penggabungan dua instansi ini yang baru dua tahun.

## **Permusan Masalah**

Apakah kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan selama kurun waktu 2014-2017 ditinjau dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar ?

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Riset Lapangan (field research), yaitu penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi penelitian dengan maksud memperoleh data dan informasi melalui wawancara dan observasi (Sugiyono, 2014).

Riset Kepustakaan (library research), yaitu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis melalui buku-buku sebagai landasan teori dalam penelitian (Sugiyono, 2014).

### **Metode Pengumpulan Data**

Survey, atau observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau subjek yang diselidiki. Observasi yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dikemudian dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2014).

Wawancara, yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2014).

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan OPD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2014-2016.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi atau instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, laporan keuangan dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **Populasi**

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:17). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran SKPD Satpol PP dan SKPD Damkar tahun 2014 – 2016 dan laporan realisasi anggaran OPD Satpol PP dan Damkar tahun 2017 sehingga didapati sebanyak 7 buah laporan realisasi anggaran yang akan diolah lebih lanjut.

### **Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling. Menurut Arikunto (2015) total sampling adalah pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada. Lebih lanjut Arikunto (2015) menjelaskan penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi. Adapun sampel pada penelitian ini menggunakan keseluruhan laporan realisasi anggaran SKPD Satpol PP dan SKPD Damkar tahun 2014 – 2016 dan laporan realisasi anggaran OPD Satpol PP dan Damkar tahun 2017 sebanyak 7 buah laporan.

### Uji Komparasi

Uji komparasi digunakan untuk menjawab rumusan. Hipotesis komparasi adalah suatu pengujian dengan cara membandingkan atau dugaan ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap nilai dua kelompok atau lebih. Jadi, pada hipotesis komparasi hanya sekedar membedakan dan tidak sama sekali memperhatikan hubungan antar variabel. Bila  $H_0$  dalam pengujian diterima maka nilai perbandingan dua sampel atau lebih dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi dimana sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu (Imam Ghazali, 2014). Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel, atau membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol, maka dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji-t sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{s_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

Dimana :

$$s_{gab} = \sqrt{\frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2}}$$

Keterangan :

$\bar{X}_A$  = rerata skor kelompok eksperimen

$\bar{X}_B$  = rerata skor kelompok control

$s_A^2$  = varian kelompok eksperimen

$s_B^2$  = varian kelompok control

$n_A$  = banyaknya sampel kelompok eksperimen

$n_B$  = banyaknya sampel kelompok control

$s_{gab}$  = simpangan baku gabungan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif pada penelitian ini membahas mengenai data laporan realisasi anggaran OPD Satpol PP dan Damkar pada tahun 2014 hingga 2016. Pembahasan ini untuk memperjelas penggunaan data yang akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji komparasi.

### Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar 2014-2016

Laporan realisasi anggaran satuan polisi pamong praja Kabupaten Tanah datar dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. LRA Satpol PP 2014

Secara umum realisasi pencapaian keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 dianggarkan Rp. 4.221.423.650,- realisasi sebesar Rp.3.676.650.394,- atau 87,10 %, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. LRA Satpol PP Tahun 2014

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	<b>Jumlah A+B</b>	<b>4.221.423.650</b>	<b>3.676.650.394</b>	<b>87,10%</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.561.934.100</b>	<b>3.129.699.770</b>	<b>87,87%</b>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.685.743.834	1.666.013.717	98,83%
2	Tunjangan Keluarga	170.678.168	166.399.848	97,49%
3	Tunjangan Jabatan 2)	52.668.000	51.480.000	97,74%
4	Tunjangan Fungsional Umum	94.271.375	91.955.000	97,54%
5	Tunjangan Beras 1)	127.162.774	122.350.900	96,22%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.644.658	31.270.785	98,82%
7	Pembulatan Gaji	51.641	50.520	97,83%
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	227.942.650	227.555.000	99,83%
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	6.180.000	4.005.000	64,81%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	320.591.000	318.831.000	99,45%
11	Honorium Panitia	827.700.000	437.120.000	52,81%
12	Honorium /Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000	150.000	100%
13	Honorium /Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	150.000	150.000	100%
14	Honorium Pegawai Honor	14.100.000	9.600.000	68,09%
15	Uang Lembur PNS	2.900.000	2.888.000	99,59%
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>659.489.550</b>	<b>546.950.624</b>	<b>82,94%</b>
1	Belanja Jasa Surat Menyurat	1.000.000	999.000	99,90%
2	Belanja Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	11.000.000	7.562.569	68,75%
3	Belanja Pemeliharaan dan Perizinan	3.000.000	2.915.000	97,17%
4	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000	1.000.000	100%
5	Belanja Alat Tulis Kantor	7.562.000	7.562.000	100%
6	Belanja Cetak Penggandaan	5.000.000	4.999.950	100%
7	Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik	900.000	900.000	100%
8	Belanja Bacaan /Majalah/Koran	4.000.000	3.982.000	99,55%
9	Belanja makan dan Minum	5.000.000	4.999.500	99,99%
10	Belanja Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	65.000.000	64.938.800	99,91%
11	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	7.000.000	4.991.400	71,31%
12	Belanja Pem Rutin/Berkala Kendaraan Dinas OPS	74.427.750	74.401.030	99,96%
13	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	2.500.000	2.500.000	100%
14	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	5.000.000	4.993.250	99,87%
15	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000	59.918.425	99,86%
16	Belanja Sosialisasi Peraturan/Perda	25.000.000	23.728.500	94,91%
17	Belanja Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan	206.839.500	83.238.200	40,24%
18	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	50.000.000	45.470.000	90,94%
19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.371.250	17.002.100	97,87%
20	Belanja Modal Pengadaan Mebeluer	1.783.000	0	0%

Sumber : Data Yang Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 1 diketahui laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2014 sebesar 87,1%. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2014 hanya empat item yang penyerapannya dibawah 70% dan banyak anggaran yang penyerapannya 100%. Presentase realisasi anggaran belanja langsung tahun 2014 cukup tinggi dengan hasil 87,87%. Tingginya presentase realisasi belanja langsung tahun 2014 dikarenakan pemberian gaji dan tunjangan pegawai, serta pengeluaran yang bersiat honor selalu diberikan tepat waktu dengan jumlah yang sama dengan anggaran. Presentase item realisasi anggaran belanja tidak langsung yang berada dibawah 80% adalah :

- a. Presentasi yang signifikan terdapat pada honorium panitia yang terealisasi 52,81%, hal ini dikarenakan kegiatan dilakukan Satpol PP yang membutuhkan kepanitiaan tidak

teralisasi sepenuhnya sehingga anggaran honorium kepanitiaan tidak terelalisasi sesuai dengan anggaran sebelumnya. Tidak terelalisasinya honorium panitia secara penuh karena sedikitnya kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tanah Datar.

- b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan realisasi sebesar 64,81%, hal ini dikarenakan tidak banyaknya tambahan pekerjaan yang mengharuskan pegawai Satpol PP bekerja diluar kondisi yang ditetapkan sebelumnya dalam artian sedikitnya pegawai yang mengambil lembur kerja.
- c. Honorium pegawai honor dengan realisasi sebesar 68,09%, hal ini dikarenakan tidak terdapat penambahan pegawai honorer di Satpol PP tahun 2014, yang ada hanya pengurangan karyawan honorer karena tidak memperpanjang kontak sehingga anggaran honorium pegawai honor untuk tahun 2014 sedikit teralisasi.

Untuk anggaran belanja langsung, presentase realisasi anggaran cukup tinggi sebesar 82,94%. Presentase item realisasi anggaran belanja langsung yang berada dibawah 80% adalah :

- a. Belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet. Hal ini dikarenakan pemakaian telepon, air, listrik dan internet OPD Satpol PP pada tahun 2014 tidak melakukan pemborosan pemakaian sehingga anggaran yang digunakan hanya sebesar 68,75%.
- b. Belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung. Hal ini dikarenakan tidak banyak item pemeliharaan gedung yang harus diganti sehingga pemakaian anggaran pemeliharaan rutin sebesar 71,31%.
- c. Belanja pelatihan pengendalian keamanan lingkungan dengan presentase sebesar 40,24%. Hal ini dikarenakan pelatihan yang diadakan oleh Satpol PP untuk anggotanya tidak sebanyak rencana sebelumnya.
- d. Belanja modal pengadaan mebeluer dengan presentase 0%, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut batal dilakukan karena tidak diperlukan pada tahun 2014.

Hambatan ataupun Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar yang prinsip boleh dikatakan tidak ada, sehingga kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah datar dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada

## 2. LRA Satpol PP 2015

Secara umum realisasi pencapaian keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 dianggarkan Rp.5.102.072.100,- realisasi sebesar Rp.4.378.749.674,- atau 85,82 %, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. LRA Satpol PP Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	<b>Jumlah A+B</b>	<b>5.102.072.100</b>	<b>4.378.749.674</b>	<b>85,82%</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.868.646.100</b>	<b>2.811.586.118</b>	<b>98,01%</b>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.795.590.141	1.777.768.028	99,01%
2	Tunjangan Keluarga	183.788.086	181.692.220	98,86%
3	Tunjangan Jabatan 2)	51.975.000	51.525.000	99,13%
4	Tunjangan Fungsional Umum	93.791.250	92.140.000	98,24%
5	Tunjangan Beras 1)	133.510.880	132.220.900	99,03%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.902.590	36.541.498	99,02%
7	Pembulatan Gaji	47.204	41.772	88,49%
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	232.500.000	221.739.700	95,37%
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	6.180.000	6.180.000	100%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	334.360.950	311.737.000	93,23%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.233.426.000</b>	<b>1.567.163.556</b>	<b>70,17%</b>
1	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan	739.500.000	552.650.000	74,73%
2	Honorium /Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000	150.000	100%
3	Honorium /Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	150.000	150.000	100%
4	Honorium Pegawai Honor	17.800.000	11.040.000	62,02%
5	Uang Lembur PNS	3.000.000	0	0%
6	Belanja Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100%
7	Belanja Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	13.200.000	7.420.562	56,22%
8	Belanja Pemeliharaan dan Perizinan	3.600.000	2.634.950	73,19%
9	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000	1.196.000	99,67%
10	Belanja Alat Tulis Kantor	19.921.500	15.188.935	76,24%
11	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.393.000	36.073.813	79,47%
12	Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik	3.100.000	2.337.000	75,39%
13	Belanja Bacaan /Majalah/Koran	6.000.000	4.828.000	80,47%
14	Belanja makan dan Minum Rapat	13.300.000	7.235.800	54,40%
15	Belanja makan dan Minum Kegiatan	181.777.000	101.708.200	55,95%
16	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	120.390.000	76.188.750	63,28%
17	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	80.000.000	38.644.350	48,31%
18	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.603.553	98,41%
19	Belanja Pem Rutin/Berkala Kendaraan Dinas OPS	129.762.600	88.839.437	68,46%
20	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	10.000.000	9.880.000	98,80%
21	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	4.044.900	67,42%
22	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	210.000.000	81.278.000	38,70%
23	Belanja Jasa Transportasi	69.525.000	11.250.000	16,18%
24	Belanja Spanduk/Baliho	800.000	350.000	43,75%
25	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000	2.250.000	90%
26	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000	0	0%
27	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000	1.200.000	14,29%
28	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	342.000	0	0%
29	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	29.640.000	25.220.000	85,09%
30	Belanja Pakaian Dinas Harian	197.250.000	179.883.000	91,20%
31	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat	207.525.000	206.820.000	99,66%
32	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	19.900.000	18.944.684	95,20%
33	Belanja Modal Pengadaan Mini Komputer	4.000.000	3.964.060	99,10%
34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	10.000.000	9.970.887	99,71%
35	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	18.600.000	18.317.075	98,48%
36	Belanja Modal Pengadaan Mebeluer	12.000.000	11.803.100	98,36%
37	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi	15.000.000	9.898.500	65,99%

Sumber : Data Yang Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 2 diketahui laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 sebesar 85,82%. Untuk anggaran belanja tidak langsung dengan presentase realisasi anggaran sebesar 98,01% hamper dikatakan sempurna karena hamper seluruh anggaran terelalisasi dan hanya terdapat perbedaan yang tipis pada bagian yang tidak terealisasi. Untuk anggaran belanja tidak langsung secara umum dapat dikatakan cukup baik dengan presentase realisasi sebesar 70,17%. Hal ini disebabkan banyaknya item anggaran belanja langsung yang tidak terelalisasi sesuai anggaran tahun 2015. Selain tu terdapat tiga item yang memiliki penyerapannya anggaran 0% atau tidak

terjadi terelalisasi. Hal ini dikarenakan anggaran kegiatan tersebut batal dilakukan karena tidak diperlukan pada tahun 2015. Item tersebut adalah :

- a. Uang lembur PNS dikarenakan Satpol PP yang berstatus PNS tidak ada mengambil jam lembur selama tahun 2015
- b. Belanja sewa ruangan rapat / pertemuan dikarenakan rapat atau pertemuan yang diadakan Satpol PP ditahun 2015 dilakukan seluruhnya pada ruangan rapat kantor Satpol PP Kabupaten Tanah Datar.
- c. Belanja iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah non pegawai negeri dikarenakan kebijakan mengenai jaminan kesehatan pegawai non PNS mengharuskan pegawai non PNS membiayai jaminan kesehatannya masing masing.

Hambatan ataupun Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar yang prinsip boleh dikatakan tidak ada, sehingga kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah datar dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 3. LRA Satpol PP 2016

Secara umum realisasi pencapaian keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dianggarkan Rp. 4.355.441.500,-realisasi sebesar Rp. 4.048.892.817,- atau 92,96 %, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. LRA Satpol PP Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	<b>Jumlah A+B</b>	<b>4.355.441.500</b>	<b>4.048.892.817</b>	<b>92,96%</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.929.572.500</b>	<b>2.869.597.159</b>	<b>97,95%</b>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.903.734.300	1.890.203.900	99,29%
2	Tunjangan Keluarga	168.174.700	166.773.988	99,17%
3	Tunjangan Jabatan 2)	51.777.000	50.940.000	98,38%
4	Tunjangan Fungsional Umum	90.214.800	89.670.000	99,40%
5	Tunjangan Beras 1)	118.327.000	117.610.080	99,39%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.927.000	9.744.099	98,16%
7	Pembulatan Gaji	33.400	28.242	84,56%
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	234.640.000	229.243.150	97,70%
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	6.920.000	6.540.000	94,51%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	342.224.300	308.843.700	90,25%
11	Uang Lembur PNS	3.600.000	0	0%
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.425.869.000</b>	<b>1.179.350.658</b>	<b>82,71%</b>
1	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan	553.740.000	545.565.000	98,52%
2	Belanja Jasa Surat Menyurat	1.440.000	1.440.000	100,00%
3	Belanja Jasa Telepon	2.080.000	646.784	31,10%
4	Belanja Jasa Air	2.408.000	996.400	41,38%
5	Belanja Jasa Listrik	9.712.000	3.198.072	32,93%
6	Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet	4.640.000	3.126.202	67,38%
7	Belanja Pemeliharaan dan Perizinan	4.320.000	3.533.000	81,78%
8	Belanja Jasa Kebersihan	1.440.000	1.375.000	95,49%
9	Belanja Jasa Publikasi	1.500.000	1.000.000	66,67%
10	Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	14.400.000	11.040.000	76,67%
11	Belanja Alat Tulis Kantor	22.836.700	15.175.750	66,45%
12	Belanja Cetak	7.120.000	4.233.500	59,46%
13	Belanja Penggandaan	11.742.000	4.568.300	38,91%
14	Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik	18.359.000	5.953.050	32,43%
15	Belanja Bacaan /Majalah/Koran	7.200.000	7.020.000	97,50%
16	Belanja makan dan Minum Rapat	9.488.000	5.597.900	59,00%
17	Belanja makan dan Minum Kegiatan	86.670.000	63.615.750	73,40%
18	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	181.405.000	159.013.000	87,66%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
19	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	139.800.000	87.853.300	62.84%
20	Belanja Kontribusi	16.520.000	1.300.000	7.87%
21	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000	10.958.801	64.46%
22	Belanja Jasa Service	16.712.500	11.460.601	68.58%
23	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.786.500	39.361.770	74.57%
24	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	71.468.500	43.906.668	61.43%
25	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	12.000.000	2.912.000	24.27%
26	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	7.200.000	5.002.100	69.47%
27	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.940.000	13.600.000	97.56%
28	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4.800.000	0	0.00%
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubeleu	61.140.800	59.572.250	97.43%
30	Pengadaan Alat Pendingin	18.000.000	15.890.700	88.28%
31	Pengadaan Personal Komputer	19.900.000	19.312.000	97.05%
32	Pengadaan Mini Komputer	8.247.500	7.906.560	95.87%
33	Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.352.500	9.128.700	88.18%
34	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.500.000	14.087.500	90.89%

Sumber : Data Yang Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 3 diketahui laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar 92,96%. Untuk anggaran belanja tidak langsung memiliki presentase sebesar 97,95% dan hanya anggaran uang lembur PNS yang memiliki presentase 0% dikarenakan Satpol PP yang berstatus PNS tidak ada mengambil jam lembur selama tahun 2016. Untuk anggaran belanja langsung memiliki realisasi sebesar 82,71%. Item didalam anggaran belanja langsung yang memiliki realisasi rendah yaitu :

- Belanja telepon, air, listrik dan internet. Rendahnya realisasi item ini dikarenakan penghematan yang dilakukan Satpol PP tahun 2016 berjalan baik sehingga anggaran yang terpakai kurang dari 50%.
- Belanja iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah non pegawai negeri dikarenakan kebijakan mengenai jaminan kesehatan pegawai non PNS mengharuskan pegawai non PNS membiayai jaminan kesehatannya masing masing
- Hambatan ataupun Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar yang prinsip boleh dikatakan tidak ada, sehingga kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah datar dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

### Laporan Realisasi Anggaran Damkar Kabupaten Tanah Datar 2014 - 2016

Laporan realisasi anggaran Damkar Kabupaten Tanah datar dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. LRA Damkar 2014

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mencapai target. Namun dilihat dari pencapaian sasaran belum seluruhnya dapat diwujudkan.

Tabel 4. LRA Damkar Tahun 2014

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
A.	URUSAN WAJIB			
I.	PEKERJAAN UMUM			
a.	Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca	40.000.000	39.471.800	98,68%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	Bencana Alam			
1.	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	25.000.000	24.685.800	98,74%
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000	14.786.000	98,57%
II.	PERUMAHAN			
a.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	285.000.000	273.358.500	95,92%
1.	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	25.000.000	23.485.200	93,94%
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	50.000.000	46.473.400	92,95%
3.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	210.000.000	203.399.900	96,86%
III.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	391.958.500	340.037.441	86,75%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.441.500	98,33%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.850.500	40.687.691	88,74%
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000	2.945.500	98,18%
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.500.000	8.454.900	99,47%
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.500.000	7.499.500	99,99%
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.500.000	7.492.000	99,89%
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.808.000	30.806.850	100%
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	13.983.450	99,88%
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.497.400	99,97%
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	100%
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	14.913.800	74,57%
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	155.000.000	154.989.850	99,99%
13.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran	86.400.000	44.925.000	52%
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.629.200.000	1.617.940.762	99,31%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.271.000.000	1.260.132.800	99,14%
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000	18.000.000	100%
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39.000.000	38.985.000	99,96%
4.	Pengadaan Mebeleur	23.700.000	23.450.000	98,95%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000	11.999.800	100%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	255.000.000	254.878.162	99,95%
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.500.000	7.495.000	99,93%
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3.000.000	3.000.000	100%
c.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	9.300.500	93,01%
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.300.500	93,01%
d.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	558.000.000	531.495.900	95,25%
1.	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam	35.000.000	34.595.300	98,84%
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi	27.500.000	26.207.000	95,30%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam			
3.	Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	35.000.000	34.858.800	99,60%
4.	Fasilitas Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan	270.000.000	261.892.600	97%
5.	Penyusunan SOP penanggulangan bencana	47.500.000	44.209.500	93,07%
6.	Sosialisasi Kebencanaan	25.000.000	24.942.000	99,77%
7.	Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan	28.000.000	23.463.000	83,80%
8.	Gladi Posko / Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	30.000.000	27.635.800	92,12%
9.	Penyusunan Data Base dan Peta Kawasan Penanggulangan Bencana	25.000.000	22.605.350	90,42%
10.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kebencanaan	10.000.000	8.852.700	88,53%
11.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	25.000.000	22.233.850	88,94%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.981.864.395</b>	<b>5.612.225.386</b>	<b>93,82%</b>

Sumber : Data Yang Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui tingkat penyerapan anggaran dinas pemadam kebakaran pada tahun 2014 sebesar 93%. Penyerapan anggaran yang tinggi didukung oleh kemampuan pihak dinas pemadam kebakaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Hal ini terbukti dengan beberapa item anggaran yang memiliki tingkat penyerapan 100%. Item penyerapan anggaran yang rendah hanya terdapat pada item penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknik perkantoran dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 52%, hal ini dikarenakan sedikitnya OPD Damkar dalam merekrut jasa tambahan untuk tenaga pendukung administrasi perkantoran karena kemampuan pegawai Damkar yang mampu untuk mengerjakannya.

## 2. LRA Damkar 2015

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mencapai target. Namun dilihat dari pencapaian sasaran belum seluruhnya dapat diwujudkan.

Tabel 5. LRA Damkar Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>A. URUSAN WAJIB</b>				
<b>I. PEKERJAAN UMUM</b>				
a.	<b>Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam</b>	<b>14.744.339.000</b>	<b>117.903.600</b>	<b>0,80%</b>
1.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Air Bersih dan Air Limbah	275.773.500	2.500.000	0,91%
2.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi	1.589.241.000	15.000.000	0,94%
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan	7.438.004.000	21.137.500	0,28%
4.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan	290.623.500	2.500.000	0,86%
5.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai	5.070.197.000	2.500.000	0,05%
6.	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	53.500.000	48.158.100	90,02%
7.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	27.000.000	26.108.000	96,70%
<b>II. PERUMAHAN</b>				
a.	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>885.460.000</b>	<b>746.851.575</b>	<b>84,35%</b>
1.	Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	40.000.000	15.955.000	39,89%
2.	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan	168.500.000	125.180.100	74,29%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	pengecahan kebakaran			
3.	Rekrutmen tenaga sukarla pertolongn bencana kebakaran	40.610.000	30.548.800	75,22%
4.	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	46.900.000	20.229.940	43,13%
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	267.250.000	250.609.175	93,77%
6.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	322.200.000	304.328.560	94,45%
<b>III.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>			
<b>a.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>539.737.900</b>	<b>485.028.397</b>	<b>89,86%</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.766.000	6.195.000	33,01%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	47.543.547	88,04%
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000	10.781.300	53,91%
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15.000.000	14.456.500	96,38%
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000	8.990.000	99,89%
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.000.000	8.995.000	99,94%
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.000.000	41.995.000	99,99%
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.603.900	25.278.500	88,37%
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.991.000	99,90%
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.932.500	98,65%
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	24.000.000	16.893.800	70,39%
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.000.000	243.088.750	97,24%
13.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran	55.368.000	46.887.500	84,68%
<b>b.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>871.250.000</b>	<b>830.086.133</b>	<b>95,28%</b>
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	22.750.000	22.700.000	99,78%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56.000.000	54.850.000	97,95%
3.	Pengadaan Mebeleur	9.000.000	8.500.000	94,44%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000	17.000.000	100%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	647.000.000	611.432.133	94,50%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.000.000	11.965.000	99,71%
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	7.500.000	6.105.000	81,40%
8.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100.000.000	97.534.000	97,53%
<b>c.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>42.000.000</b>	<b>12.620.500</b>	<b>30,05%</b>
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.000.000	12.620.500	30,05%
<b>d.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.997.700</b>	<b>99,95%</b>
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.997.700	99,95%
<b>e.</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>846.946.000</b>	<b>683.254.400</b>	<b>80,67%</b>
1.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	50.000.000	40.085.000	80,17%
2.	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bancana Alam	27.250.000	26.685.000	97,93%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam	21.900.000	19.855.000	90,66%
4.	Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	58.500.000	38.759.000	66,25%
5.	Fasilitas Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan	385.996.000	363.873.400	94,27%
6.	Penyusunan SOP penanggulangan bencana	41.800.000	36.923.400	88,33%
7.	Sosialisasi Kebencanaan	43.800.000	22.201.000	50,69%
8.	Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan	55.000.000	31.223.700	56,77%
9.	Gladi Posko / Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	69.500.000	64.088.600	92,21%
10.	Penyusunan Data Base dan Peta Kawasan Penanggulangan Bencana	43.500.000	32.796.800	75,39%
11.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kebencanaan	50.000.000	6.763.500	13,53%
<b>JUMLAH</b>		<b>17.944.732.900</b>	<b>2.887.374.305</b>	<b>16,09%</b>

Sumber : Data Yang Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui tingkat penyerapan anggaran dinas pemadam kebakaran pada tahun 2015 tergolong sangat rendah sebesar 16,09%. Penyerapan anggaran yang rendah tidak didukung oleh kemampuan pihak dinas pemadam kebakaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya item anggaran yang memiliki penyerapan dibawah 50%. Selain itu peningkatan anggaran program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam dari selumnya kurang dari 100 juta menjadi lebih dari 20 miliar membuat pihak Damkar tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan yang sangat signifikan tersebut. Dampaknya terdapat pada tingkat realisasi anggaran yang kurang dari 1% kecuali untuk pendataan dan inventarisasi dampak pasca bencana dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### 3. LRA Damkar 2016

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mencapai target. Namun dilihat dari pencapaian sasaran belum seluruhnya dapat diwujudkan.

Tabel 6. LRA Damkar Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>A. URUSAN WAJIB</b>				
<b>I. PEKERJAAN UMUM</b>				
a.	<b>Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam</b>	<b>14.743.557.100</b>	<b>11.194.012.913</b>	<b>75,92%</b>
1.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Air Bersih dan Air Limbah	273.273.500	243.413.000	89,07%
2.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi	1.574.241.000	1.273.360.750	80,89%
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan	7.416.866.500	5.224.302.063	70,44%
4.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan	288.123.500	240.138.500	83,35%
5.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai	5.063.697.000	4.094.465.500	80,86%
6.	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	58.484.500	53.060.100	90,73%
7.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35.589.500	35.292.000	99,16%
8.	Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA, PDNA)	33.281.600	29.981.000	90,08%
<b>II. PERUMAHAN</b>				
a.	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>895.625.000</b>	<b>723.055.890</b>	<b>80,73%</b>
1.	Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	17.625.000	17.276.400	98,02%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	35.700.000	35.688.950	99,97%
3.	Rekrutmen tenaga sukarla pertolongn bencana kebakaran	36.975.000	30.812.000	83,33%
4.	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	144.625.000	143.876.400	99,48%
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	10.000.000	9.900.000	99%
6.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	650.700.000	485.502.140	74,61%
<b>III. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>				
<b>a.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>576.194.350</b>	<b>503.195.047</b>	<b>87,33%</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	3.845.500	96,14%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69.500.000	43.734.535	62,93%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	37.500.000	21.720.350	57,92%
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	13.000.000	12.941.500	99,55%
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	9.999.000	99,99%
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.995.000	99,95%
7.	Penyediaan alat tulis kantor	42.072.000	42.072.000	100%
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.982.350	23.957.000	99,89%
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.997.000	99,97%
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	13.600.000	13.600.000	100%
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.700.000	5.640.000	98,95%
12.	Penyediaan makanan dan minuman	19.471.000	11.026.950	56,63%
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	307.000.000	284.540.212	92,68%
14.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran	10.369.000	10.126.000	97,66%
<b>b.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.773.312.050</b>	<b>2.742.919.100</b>	<b>98,90%</b>
1.	Pembangunan gedung kantor	399.600.000	383.290.000	95,92%
2.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.503.200.000	1.495.172.000	99,47%
3.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	70.418.050	70.361.050	99,92%
4.	Pengadaan peralatan gedung kantor	81.975.000	81.975.000	100%
5.	Pengadaan mebeleur	97.000.000	96.900.000	99,90%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.999.000	99,99%
7.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	591.119.000	585.257.050	99,01%
8.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	9.990.000	99,90%
9.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000	4.975.000	99,50%
<b>c.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>42.680.000</b>	<b>31.427.500</b>	<b>73,64%</b>
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.680.000	31.427.500	73,64%
<b>d.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.849.400</b>	<b>56,99%</b>
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	2.849.400	56,99%
<b>e.</b>	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.662.600</b>	<b>76,63%</b>
1.	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	10.000.000	7.662.600	76,63%
<b>f.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.847.000</b>	<b>82,52%</b>

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	3.450.000	2.847.000	82,52%
<b>g.</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>939.500.500</b>	<b>905.799.125</b>	<b>96,41%</b>
1.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	36.150.000	31.347.800	86,72%
2.	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	237.733.000	237.733.000	100%
3.	Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana	97.600.000	86.814.900	88,95%
4.	Fasilitas potensi masyarakat dan penanggulangan bencana dan penyelamatan	372.720.000	366.916.125	98,44%
5.	Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	42.550.000	39.110.400	91,92%
6.	Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan	37.000.000	33.579.700	90,76%
7.	Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	55.000.000	51.957.200	94,47%
8.	Penyusunan database dan peta kawasan rawan bencana	35.025.000	33.905.000	96,80%
9.	Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan	25.722.500	24.435.000	94,99%
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.989.319.000</b>	<b>16.113.768.575</b>	<b>80,61%</b>

Sumber : Data Yang Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui tingkat penyerapan anggaran dinas pemadam kebakaran pada tahun 2016 sebesar 80,61%. Penyerapan anggaran ini lebih baik dari pada tahun 2015 namun masih lebih buruk dari tahun 2014.

## Laporan Realisasi Anggaran OPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar 2017

Laporan realisasi anggaran Damkar Kabupaten Tanah datar dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 7.** LRA OPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,770,813,300	4,734,990,596	99.25%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,066,832,600	3,056,085,600	99.65%
2	Tunjangan Keluarga	245,813,200	244,057,172	99.29%
3	Tunjangan Jabatan 2)	151,470,500	150,785,000	99.55%
4	Tunjangan Fungsional Umum	130,501,100	129,765,000	99.44%
5	Tunjangan Beras 1)	171,686,100	170,476,680	99.30%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,634,200	3,493,564	96.13%
7	Pembulatan Gaji	42,900	42,425	98.89%
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	340,637,700	330,614,075	97.06%
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	228,942,800	227,165,000	99.22%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	430,952,200	396,845,000	92.09%
11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300	0	0.00%
12	Uang Lembur PNS	21,110,000	21,049,000	99.71%
13	Uang Lembur Non PNS	5,083,170	4,970,000	97.77%
B	BELANJA LANGSUNG	5,050,620,000	4,538,212,478	89.85%
1	Belanja Alat Tulis Kantor	50,734,200	49,635,000	97.83%
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronk (Lampu Pijar, Baterai Kering)	23,964,000	23,513,000	98.12%
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,500,000	2,433,000	97.32%
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3,000,000	2,979,500	99.32%
5	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12,600,000	12,600,000	100.00%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
6	Belanja Peralatan Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar	6,690,000	6,515,000	97.38%
7	Belanja Spanduk/Baliho/Bendera	12,870,000	11,220,000	87.18%
8	Belanja Telepon	2,400,000	1,597,465	66.56%
9	Belanja Air	1,200,000	1,139,700	94.98%
10	Belanja Listrik	12,000,000	9,919,520	82.66%
11	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,640,000	8,615,000	99.71%
12	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	6,600,000	6,540,750	99.10%
13	Belanja Jasa Transportasi	30,930,000	30,480,000	98.55%
14	Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	1,449,170,700	1,437,225,000	99.18%
15	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	11,214,730	11,214,730	100.00%
16	Belanja Jasa Service	37,440,000	37,439,698	100.00%
17	Belanja Penggantian Suku Cadang	172,192,000	162,313,658	94.26%
18	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	351,441,800	221,512,944	63.03%
19	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26,500,000	21,736,000	82.02%
20	Belanja Cetak	39,447,000	38,638,600	97.95%
21	Belanja Penggandaan	25,744,600	23,804,000	92.46%
22	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0	0.00%
23	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,375,000	3,375,000	100.00%
24	Belanja Sewa Penginapan	16,125,000	16,125,000	100.00%
25	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,394,000	9,106,900	87.62%
26	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,232,000	1,345,300	60.27%
27	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	161,271,300	158,361,000	98.20%
28	Belanja Pakaian Sipil lengkap (PSL)	36,400,000	35,700,000	98.08%
29	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	127,452,000	126,400,000	99.17%
30	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	138,565,000	138,124,000	99.68%
31	Belanja Pakaian Olah Raga	35,600,000	35,600,000	100.00%
32	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	245,186,000	205,208,000	83.69%
33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,636,700	123,364,900	73.15%
34	Belanja Kontribusi	15,328,000	9,000,000	58.72%
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan	25,000,000	24,909,000	99.64%
36	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11,000,000	8,390,500	76.28%
37	Belanja Pemeliharaan Meubelur	6,400,000	0	0.00%
38	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran	8,005,000	7,600,000	94.94%
39	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52,250,000	52,250,000	100.00%
40	Iyuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja	43,465,500	35,509,500	81.70%
41	Iyuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja	2,652,300	2,148,120	80.99%
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair	9,000,000	9,000,000	100.00%
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Dapur	1,500,000	1,500,000	100.00%
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24,500,000	24,500,000	100.00%
45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	154,000,000	153,510,000	99.68%
46	Pengadaan Personal Komputer	38,900,000	38,400,000	98.71%
47	Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14,000,000	14,000,000	100.00%
48	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6,000,000	6,000,000	100.00%
49	Pengadaan Alat Komunika Radio SSB	24,600,000	24,600,000	100.00%
50	Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	10,000,000	9,950,000	99.50%
51	Pengadaan Alat Keamanan	6,800,000	6,800,000	100.00%
52	Pengadaan Alat Bantu Keamanan	0	0	0.00%
53	Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	494,000,000	456,822,693	92.47%
	Jumlah	9,821,433,300	9,273,203,074	94.42%

Secara umum realisasi pencapaian keuangan pada 2017 Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dianggarkan Rp. 9.821.433.300,-realisasi sebesar Rp. 9.273.203.074,- atau 94,42 %dan berada dikategori efektif. Berdasarkan realisasi capaian kinerja keuangan, secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah datar telah mencapai target. Dari anggaran yang di alokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.821.433.300,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) mampu direalisasikan hingga akhir tahun 2017 sebesar Rp. 9.273.203.074,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah ) atau sebesar 94,42%. Hambatan ataupun Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar yang prinsip boleh dikatakan tidak ada, sehingga kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah datar dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

### Uji Komparasi

Uji komparasi digunakan adalah uji komparasi 2 sampel berpasangan. Uji komparasi 2 sampel berpasangan untuk menguji beda sampel berpasangan dengan kategori lebih dari dua pada data ordinal atau nominal. Data yang diuji pada penelitian ini adalah data anggaran dan realisasinya, data tersebut kemudian dijadikan dalam bentuk log agar mempermudah pengujian lebih lanjut. Data yang diuji dapat dilihat pada lampiran. Hasil pengujian uji komparasi 2 sampel berpasangan dapat dilihat berikut ini.

**Tabel 8.** Paired Samples Statistik

	N	Std. Dev	Std. Error
Anggaran (Y1)	17,08	262	1,99
Pair 1 Realisasi			
Anggaran (Y2)	16,44	262	3,16

**Tabel 9.** Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Anggaran (Y1) & Realisasi Anggaran (Y2)	262	,683	,000

Berdasarkan tabel paired samples statistic menunjukkan bahwa rata-rata anggaran (Y1) sebesar 17,08 dengan sampel data 262 dan standar deviasi sebesar 1,99. Sedangkan rata rata realisasi anggaran (Y2) memiliki rata rata 16,44 dengan data 262 dan standar deviasi 3,16. Untuk paired samples correlatian menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0.683 dengan sig sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara anggaran dan realisasi anggaran adalah kuat dan signifikan. Selanjutnya untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat paire samples test.

**Tabel 10.** Paired Samples Test

	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower				Upper
Pair 1 Anggaran (Y1) & Realisasi Anggaran (Y2)	,6362	2,3180	,1432	,3542	,9182	4,443	261	,000

Pada tabel 10 diketahui nilai t hitung sebesar 4.443 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai t hitung adalah rasio antara nilai mean dengan nilai standard error mean pada

Paired Test maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, artinya terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kinerja anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 mengalami peningkatan dan kinerja anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 mengalami peningkatan pula.

### Pembahasan

Hasil uji komparasi menunjukkan artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014-2017. Perbedaan tersebut terlihat dari hasil realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%. Setelah diketahui kinerja realisasi anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014 – 2017 maka dapat dibuatkan perkembangan kinerjanya. Peningkatan paling signifikan terdapat pada program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam dimana realisasi anggaran jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

**Tabel 11.** Perkembangan Kinerja Realisasi Anggaran OPD Satpol PP dan Damkar 2014-2017

Tahun	Satpol PP	Damkar	OPD Satpol PP dan Damkar
2014	87,10 %	93,82 %	
2015	85,82 %	16,09 %	
2016	92,96 %	80,61 %	
2017			94,42

Sumber : Data Yang Diolah Penulis (2018)

Hasil efektifitas tersebut kemudian dicocokkan dengan tabel kriteria efektifitas yang dikeluarkan oleh kepmendagri, sehingga didapatkan tingkat kemampuan efektifitas OPD Damkar dan Satpol PP dalam memanfaatkan anggaran. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran biaya dikatakan sangat efektif.
2. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran biaya dikatakan efektif.
3. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran biaya dikatakan cukup efektif.
4. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran biaya dikatakan kurang efektif.
5. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran biaya dikatakan tidak efektif.

Dari perbandingan tersebut maka didapatkan kinerja keuangan OPD Damkar dan Satpol PP tahun 2014-2017 sebagai berikut :

**Tabel 12.** Kriteria Efektifitas Anggaran OPD Satpol PP dan Damkar 2014-2017

Tahun	Satpol PP	Kriteria	Damkar	Kriteria
2014	87,10 %	Cukup Efektif	93,82 %	Efektif
2015	85,82 %	Cukup Efektif	16,09 %	Tidak Efektif
2016	92,96 %	Efektif	80,61 %	Cukup Efektif
2017		94,42		Efektif

Kinerja anggaran Satpol PP tahun 2014 dan 2015 bernilai cukup efektif karena berada di antara 80%-90% dan kinerja anggaran pada tahun 2016 bernilai efektif. Sedangkan untuk Damkar kinerja anggaran pada tahun 2014 bernilai efektif, pada tahun 2015 tidak efektif dan tahun 2016 cukup efektif. Kinerja OPD Satpol PP dan Damkar setelah penggabungan pada tahun 2017 sebesar 94,42% yang berarti penyerapan anggaran berjalan efektif.

Kewenangan dalam mengelola keuangan bagi perangkat daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut oleh PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tidak sampainya realisasi yang 100% oleh perangkat daerah dikarenakan realisasi anggaran harus dilaporkan berdasarkan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan kegiatannya. Dana kegiatan yang telah dialokasikan namun tidak dijalankan tidak dapat dialihfungsikan secara langsung untuk menutup kekurangan dana kegiatan yang lain.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roland Gerald Tooy (2016) dimana efektifitas anggaran instansi pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja yang dapat dijadikan pedoman dasar bagi auditor untuk menilai kinerja keuangan instansi pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Warih Komarasari (2017) menyebutkan tinggi rendahnya penyerapan anggaran pada instansi pemerintahan tidak terlepas dari kemampuan instansi tersebut dalam memanfaatkan SDM yang dimiliki dan pemanfaatan teknologi untuk menjalankannya. Sehingga untuk mencapai tingkat efektifitas anggaran yang baik diperlukan perencanaan yang matang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Terdapat peningkatan kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2014-2017 dengan realisasi tahun 2014 sebesar 87,10% (cukup efektif), pada tahun 2015 menurun menjadi 85,82% (cukup efektif), pada tahun 2016 meningkat menjadi 92,96% (efektif) meningkat kembali setelah melakukan penggabungan SKPD Satpol PP dan SKPD Damkar menjadi OPD Satpol PP dan Damkar menjadi 94,42% (efektif). Namun terjadi penurunan kinerja keuangan pada Pemadam Kebakaran dengan realisasi tahun 2014 sebesar 93,82% (cukup efektif), pada tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan karena anggaran penanggulangan pasca bencana alam yang hanya terealisasi 0,8% dari anggaran sebesar 14.744.339.000 sehingga secara keseluruhan realisasi anggarannya menjadi 16,09% (tidak efektif) dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 80,61%. (cukup efektif).
2. Berdasarkan hasil uji komparasi 2 sampel berpasangan diketahui bahwa anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan dan kinerja anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan pula.

### **Saran**

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satpol PP dan Damkar yang baru dibentuk agar mampu meningkatkan kinerja keuangan kedua perangkat daerah tersebut sebelum terjadi penggabungan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mampu melakukan pengembangan penelitian agar objek yang diteliti lebih luas.

## **REFERENSI**

- Agus Nasir, 2015, Penerapan Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2014, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Salemba Empat.
- Ektiyanisari, 2013, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan

- (Studi Kasus Pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta)
- Febriani Asmorowati, 2016, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan pada PT Kalbe Farma Tbk
- Galih Retno Aryati, 2014, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Bumn Pada PT. PLN (Persero) Tahun 2012
- Ghozali, Imam. 2014. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro.
- H. Lili M Sadeli. 2012. Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta : Bumi Aksara
- Hendry Andres Maith, 2013, Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017, Penyertaan Standar Pemerintahan. Grafindo : Jakarta
- Kashmir, 2012, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-3, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996
- Munawir, 2012. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty
- Nurhayati, 2016, Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Prawirosentono, Suryadi, 2013. Manajemen Sumberdaya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Yogyakarta.
- Roland Gerald Tooy, 2016, Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara
- Simamora, Henry. 2014 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN
- Sofyan Syafri Harahap, 2012. Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Mulyani, 2017, Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta
- Suhanda, 2012, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Padang : Andalas Lima.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Warih Komarasari, 2017, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)

Wibowo, 2014. Manajemen Kinerja. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Yuli Orianti, 2016, Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan